BAB III

DATA HASIL TUGAS AKHIR

3.1 Gambaran Umum Perusahaan

Awal kelistrikan di Bumi Parahyangan sudah ada semenjak Pemerintah Kolonial Belanda masih bercokol di tataran tanah sunda. Ditahun 1905, di Jawa Barat khususnya kota Bandung, berdiri perusahaan yang mengelola penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan publik. Nama perusahaan itu *Bandungsche Electriciteit Maatschaappij I* (BEM). Dalam perjalanan BEM pada tanggal 1 Januari 1920 berubah menjadi Perusahaan Perseroan yaitu *Gemeenschapplijk Electriciteit Bedrijif Voor Bandng* (GEBEO), pendirinya ditetapkan melalui akte notaris Mr.Andrian Hendrik Van Ophuisen dengan nomor: 213 pada tanggal 31 Desember 1949.

Setelah kekuasaan penjajahan beralih ke tangan Pemerintah Jepang, antara waktu 1942 – 1945, pendistribusian tenaga listrik dilaksanakan oleh *Djawa Denki Djigyo Sha Bandoeng Shi Sha* dengan wilayah kerja diseluruh Pulau Jawa. Tahun 1957 pada saat Indonesia telah merdeka, menjadi awal penguasaan pengelolaan penyediaan tenaga listrik diseluruh tanah air yang ditangani langsung oleh Pemerintah Indonesia. 27 Desember 1957 GEBEO diambil langsung oleh Pemerintah Indonesia yang ditetapkan lewat Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1959. Selanjutnya, ditahun 1961 melalui Peraturan Pemerintah No. 67 dibentuk Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN) sebagai wadah kesatuan pimpinan PLN. Sejalan dengan itu PLN Bandung pun berubah menjadi

PLN Exploitasi XI sebagai kesatuan BPU-PLN di Jawa Barat, di luar DKI Jaya dan Tanggerang.

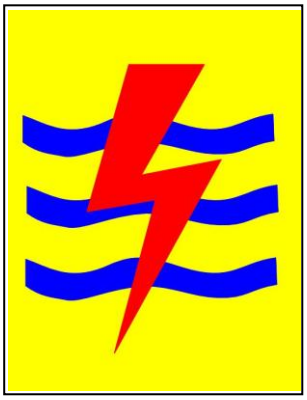
Pada tahun 1970-an dikeluarkan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara menyebutkan status PLN menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara. Kemudian diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat. Memasuki 1990-an dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.23 Tahun 1994 tanggal 16 Juni 1994, diubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan nama PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat sejak tanggal 30 Juni 1994. Memenuhi tuntutan perubahan dan perkembangan dari tahun ketahun mengalami peningkatan maka keluarlah Keputusan Direksi PT PLN (Persero) tanggal 20 Februari 2001 yang menjadi landasan hukum perubahan nama menjadi PT PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat. Akhirnya mengacu Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No.120.K/010/DIR/2002 tanggal 27 Agustus 2002 berubah lagi menjadi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten wilayah kerjanya meliputi Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Banten hingga saat ini.

Kantor PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten merupakan kantor pusat wilayah yang bertugas mendistribusikan tenaga listrik kepada konsumen, baik konsumen perorang, rumah tangga maupun konsumen industri yang dibantu oleh seluruh Area Pelayanan Jaringan (APJ) dan Area Pengatur Distribusi (APD) di propinsi Jawa Barat dan propinsi Banten. PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten membawahi 17 APJ dan 1 APD, yaitu :

1. PLN APJ Cirebon
2. PLN APJ Garut
3. PLN APJ Tasikmalaya
4. PLN APJ Majalaya
5. PLN APJ Bandung
6. PLN APJ Cimahi
7. PLN APJ Sumedang
8. PLN APJ Sukabumi
9. PLN APJ Cianjur
10. PLN APJ Banten Utara
11. PLN APJ Banten Selatan
12. PLN APJ Purwakarta
13. PLN APJ Karawang
14. PLN APJ Bogor
15. PLN APJ Bekasi
16. PLN APJ Gunung Putri
17. PLN APJ Depok
18. APD Bandung

Sedangkan PT. PLN (Persero) Satuan Kerja Listrik Perdesaan Jawa Barat, berdasarkan surat tugas bagi pegawainya, merupakan bagian dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten, yang mempunyai struktur organisasi dan job description sendiri, karena Satuan Listrik Perdesaan Jawa Barat bertugas mengelola anggaran yang bersumber dana APBN.

Setiap perusahaan senantiasa dilengkapi dengan lambang perusahaan, lambang mempunyai arti penting bagi perusahaan dan merupakan tanda pengenal yang tetap. Bahkan lambang mampu mencerminkan keberadaan perusahaan. PT.PLN (Persero) mempunyai satu lambang yang berbentuk petir atau kilat yang telah lama dipakai oleh PT.PLN (Persero) beserta satuan-satuannya.



Sumber: www.pln-jabar.co.id

Gambar 3.2
Lambang PT.PLN(Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten

Diartikan sebagai berikut :

a. Petir atau Kilat melambangkan tenaga listrik yang terkandung didalamnya.
b. Lambang gelombang dipergunakan karena segala macam energi dinyatakan sebagai gelombang (cahaya, listrik, dan lain-lain). Gelombang disejajarkan tiga buah diartikan sebagai tiga sikap karyawan PT. PLN (Persero) dalam melaksanakan tugas negara selalu bekerjakeras, bergerak dan bertindak cepat
c. Warna kuning keemasan melambangkan keagungan Tuhan Yang Maha Esa, serta agungnya keajaiban PT.PLN (Persero).
d. Warna merah darah melambangkan keberanian dalam melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan pembangunan.
e. Warna biru laut melambangkan kesetiaan dan pengabdian pada tugas untuk menuju kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Adapun moto yang dimiliki PT. PLN (Persero), seperti yang di bawah ini :

Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik (Electricity for a Better Life).

3.2 Struktur Organisasi PT.PLN (Persero) Satuan Kerja Listrik Perdesaan Jawa Barat (LISDES JABAR)

Menurut bisnis modern dalam bukunya Pengantar Bisnis (2006:115) suatu struktur yaitu harus menempatkan karyawan dari berbagai tingkat kemampuan guna mencapai efesiensi yang maksimal atau gambar yang menjelaskan tentang garis wewenang seseorang dalam menjalankan tugasnya.

Menurut Sedarmayanti (2001:71-72) dirumuskan mengenai Organisasi sebagai bentuk atau susunan orang-orang dengan tugas pokok dan fungsi tertentu dan diatur prosedurnya, sehingga terdapat hubungan serta kerja sama beberapa orang guna mencapai suatu tujuan yang ditetapkan oleh organisasi.

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi.

Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa.

Empat elemen yang terpenting dalam struktur organisasi yaitu :

1. Adanya spesialisasi kegiatan kerja
2. Adanya standardisasi kegiatan kerja

3. Adanya koordinasi kegiatan kerja
4. Besaran seluruh organisasi

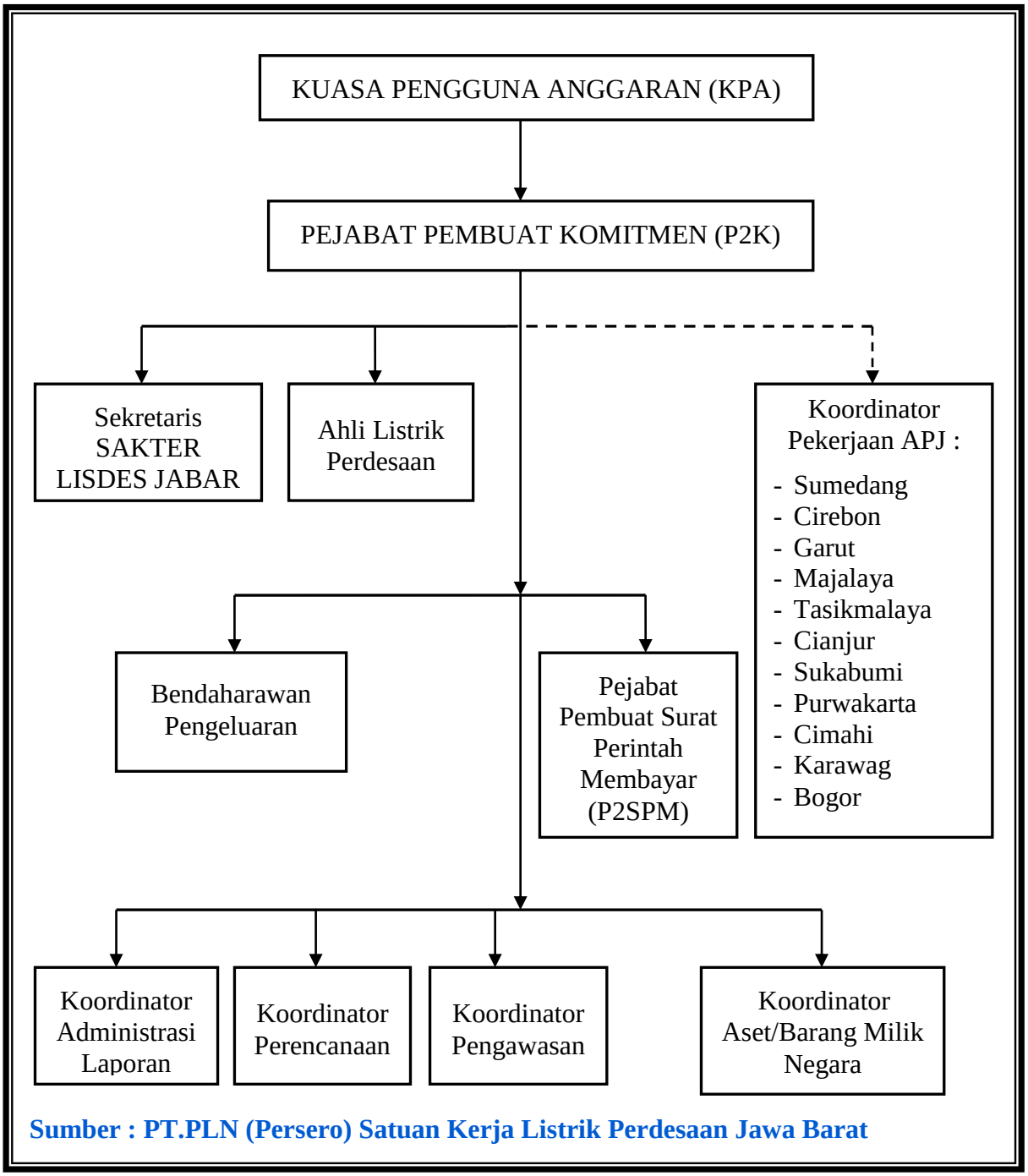
Pada bagian ini penulis membagikan struktur organisasi dan uraian tugas secara khusus mengenai PT. PLN (Persero) Satuan Kerja Listrik Perdesaan Jawa Barat (LISDES JABAR). Struktur organisasi PT. PLN (Persero) Satuan Kerja Listrik Perdesaan Jawa Barat (LISDES JABAR) berbentuk Organisasi Lini dan Staf, staf terdiri dari spesialis-spesialis tertentu yang diperlukan oleh perusahaan, dapat dikoordinasi dalam sebuah organisasi yang berbeda diluar organisasi garis.

Kebaikan Organisasi Lini dan Staf :

1. Tugas yang sangat berat bagi pimpinan dalam organisasi garis bisa dikurangi dengan adanya staf.
2. Tidak terjamin adanya pimpinan tunggal dalam perusahaan. Sebab staf tidak dapat campur tangan dalam urusan perusahaan.

Keburukan Organisasi Lini dan Staf :

1. Kemungkinan timbul perselisihan antara staf dan pimpinan.
2. Petunjuk-petunjuk dari staf mungkin hanya bersifat teoritis kurang memperhatikan soal praktek. Ini menimbulkan ketegangan dengan pihak pelaksana. Perbedaan dalam pendidikan, sikap dan mentalitas memperbesar pertentangan tersebut.
3. Nasehat yang diberikan atau data yang telah dikumpulkan oleh staf tidak dipergunakan oleh pimpinan, ini berarti pengeluaran biaya sia-sia.
4. Ada pula kemungkinan pimpinan sangat tergantung kepada staf sehingga pimpinan kurang berani mengambil inisiatif.



Sumber : PT.PLN (Persero) Satuan Kerja Listrik Perdesaan Jawa Barat

Gambar 3.3

STRUKTUR ORGANISASI

SATUAN KERJA LISTRIK PERDESAAN JAWA BARAT (LISDES JABAR)

TAHUN ANGGARAN 2009

3.3 Job Description (Deskripsi Jabatan)

1. Pejabat Pembuat Komitmen (P2K)

Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Listrik Perdesaan Jawa Barat dalam mencapai sasaran usaha yang ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2009, serta bertanggung jawab dari segi keuangan dan segi fisik atas pelaksanaan kegiatan.

2. Sekretaris Listrik Perdesaan (SEKLISDES)

Sekretaris Listrik Perdesaan mempunyai tugas membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam bidang pelaksanaan administrasi kegiatan, pengolahan data, laporan kegiatan atau pelaporan evaluasi serta tugas lain ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

3. Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (P2SPM)

Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (P2SPM) mempunyai tugas :

a. Memeriksa kelengkapan berkas dokumen SPP, mengisi checklist kelengkapan berkas SPP, ketersediaan Pagu dalam DIPA, kesesuaian rencana, kelayakan hasil kerja yang dicapai, kebenaran hak tagih, serta pencapaian tujuan kegiatan sesuai indikator kinerja dalam DIPA.
b. Mencatat dalam buku pengawasan SPP.
c. Menyimpan/mengarsipjan seluruh bukti asli pembayaran dalam lampiran SPP yang diajukan oleh P2K dan menatausahakan SPM serta Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

d. Menyampaikan laporan realisai penyerapan dana berdasarkan SPM dan SP2D serta realisasi penerimaan pajak maupun bukan pajak kepada Kuasa Pengguna Anggaran setiap bulan.

1. Bendaharawan Pengeluaran

   Bendaharawan Pengeluaran mempunyai tugas :

   a. Melaksanakan pembukuan dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang dikelolanya.
   b. Menyampaikan berita acara pemeriksaan kas tiga bulan sekali ke Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral c.q Biro Keuangan.
   c. Selaku wajib pungut (wapu) harus menyetorkan hasil pungutan ke kas negara baik Penerimaan Pajak maupun Penerimaan Bukan Pajak dan melaporkan ke Kuasa Pengguna Anggaran setiap bulannya.

2. Koordinator Teknis Administrasi dan Laporan

   Koordinator Teknis Administrasi mempunyai tugas membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam bidang pelaksanaan administrasi kegiatan, penyelesaian surat menyurat dan membuat laporan bulanan, triwulan, tahunan baik permintaan intern maupun ekstern. serta tugas lainnya yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

3. Koordinator Teknis Perencanaan

   Koordinator Teknis Perencanaan mempunyai tugas :

   a. Perencanaan dan perekayasaan enjiniring dan spesifikasi teknik serta penyusunan dokumen lelang pekerjaan pembangunan dan pemugaran sarana pendistribusian tenaga listrik.

b. Perencanaan pelaksanaan pembangunan dan pemugaran sarana pendistribusian tenaga listrik.
c. Pengevaluasian pelaksanaan pembangunan dan pemugaran sarana pendistribusian tenaga listrik.
d. Perencanaan perbaikan pembangunan dan pemugaran sarana pendistribusian tenaga listrik.

7. Koordinator Teknis Pengawasan

Koordinator Teknis Pengawasan mempunyai tugas :

a. Pelaksanaan pembangunan dan pemugaran sarana pendistribusian tenaga listrik.
b. Pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pemugaran sarana pendistribusian tenaga listrik.
c. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Pelaksanaan Teknis Pengawasan agar berkoordinasi dengan Pengawas lapangan dimasing-masing unit PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten di APJ terkait yang ditunjuk oleh Manajer APJ.